

Judul : DPR Terima Usulan Pemerintah Soal RAPBN 2017
Tanggal : Jumat, 27 Mei 2016
Surat Kabar : Republika
Halaman : 13

DPR Terima Usulan Pemerintah Soal RAPBN 2017

● EKO SUPRIYADI

JAKARTA — Sebagian besar fraksi di DPR sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.

Kesepakatan diperoleh setelah rapat paripurna yang mengagendakan pandangan fraksi-fraksi DPR atas materi yang disampaikan pemerintah tentang pokok-pokok pembicaraan pendahuluan penyusunan rancangan anggaran tahun depan dirampungkan.

"Tadi telah disampaikan pandangan fraksi terhadap rancangan ekonomi makro di Indonesia. Secara umum sebagian besar fraksi bisa menerima terkait usulan atau pandangan pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro," ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Jakarta, Kamis (26/5). Meskipun "mulus", Taufik tidak memungkiri ada pandangan-pandangan dari masing-masing fraksi yang tajam.

Fraksi-fraksi di DPR juga mengkritisi besaran pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga nilai tukar rupiah yang dinilai terlalu optimistis.

Berdasarkan data yang dihimpun, pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 2017 berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,9 persen. Sedangkan, inflasi empat persen plus-minus satu persen.

Sementara, nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp 13.650 per dolar AS hingga Rp 13.900 per dolar AS. Fraksi Partai Golkar menilai, rentang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah masih bisa ditingkatkan lagi.

Fraksi Golkar malah menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi yang diajukan pemerintah masih bisa ditingkatkan lagi, dari 5,6 persen sampai 6,1 persen. Sebab, pemerintah mengajukan angka pertumbuhan dari 5,3 sampai 5,9 persen.

Selain asumsi ekonomi makro,

fraksi-fraksi di DPR juga menyoroti efektivitas dan efisiensi anggaran. "Agar penggunaan anggaran efektif," kata Taufik yang berasal dari Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut.

Sentralisasi penggunaan anggaran, lanjut Taufik, harus menyentuh masyarakat secara langsung. Utamanya untuk menurunkan tingkat kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan memperkecil rasio gini.

Anggota Fraksi PDIP Agustina Wilujeng Pramestuti meminta, RAPBN 2017 tidak mengesampingkan porsi pembangunan sosial seperti yang tertera pada Pasal 33 UUD 1945.

"Politik anggaran 2017, harus melaksanakan Trisakti bangsa secara nyata."

Pandangan fraksi-fraksi nantinya akan direspons oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, dalam rapat paripurna pada 2 Juni 2016 mendatang.

■ ed: muhammad iqbal